

**Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap  
Ketimpangan Antar Daerah**

*The Effect of Fiscal Decentralization and Economic Growth on Interconnection*

**Latifah\*, Dewi Rahayu**

Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat  
[\\*latifahismi82@gmail.com](mailto:*latifahismi82@gmail.com)

**Abstract**

*This research was conducted to determine the effect of fiscal decentralization and economic growth of South Kalimantan Province on inter-regional inequality. The data used in this study is secondary data with 12 years (time series), which is published once a year by the Central Statistics Agency of the Province of South Kalimantan. The data needed is data on total balancing funds, economic growth, and GDP at the current price and population. The data analysis technique used is the multiple linear regression analysis methods.*

*The results showed that simultaneously and partially, the variables of fiscal decentralization and economic growth had a positive and significant effect on inter-regional inequality.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Economic Growth, Regional Inequality*

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang diproksi dari total dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan antar daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan kurun waktu 12 tahun (*time series*), yang diterbitkan satu tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang diperlukan berupa data total dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku dan jumlah penduduk. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan dan parsial variabel desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar daerah.

**Kata Kunci :** *Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Antar Daerah*

**PENDAHULUAN**

Era desentralisasi fiskal merupakan jawaban dari keluhan masyarakat di era sentralisasi yang merasa sentralisasi membuat masyarakat daerah tidak mampu berkembang, tertekan dan dirugikan dari kebijakan terpusat. Sentralisasi menimbulkan disparitas pendapatan yang sangat lebar antar daerah, misalokasi dalam menggunakan anggaran negara dan kelambanan dalam menuntaskan persoalan (Sudantoko, 2003). Era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber daya daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut agar daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pada era desentralisasi ini, pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam

menstimulus fiskal untuk daerah dalam meningkatkan pembangunannya. (Wardana, Juanda, Siregar, & Wibowo, 2013)

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu penilaian atas hasil kegiatan barang dan jasa yang diolah oleh suatu negara atau daerah, pertumbuhan ekonomi yang berasal dari daerah kabupaten/kota menjadi nilai pertumbuhan ekonomi provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah akan menimbulkan suatu keadaan yang memperlihatkan daerah yang satu dengan yang lain berbeda.

Otonomi daerah memberikan wewenang pada tiap daerah untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendak daerah, adapun otonomi daerah memberikan wewenang pada bidang keuangan/finansial daerah atau disebut juga desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal terdiri atas dana perimbangan yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan membuat potensi daerah semakin besar karena peningkatannya, dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda dapat menimbulkan ketimpangan. Penelitian Chandra, Hidayat, & Rosmedi (2017), menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi memberikan dampak negatif atau berdampak buruk terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Diki Saputra (2016), menyebutkan bahwa indeks Williamson berlaku di Provinsi Jawa Barat, dimana hubungan indeks Williamson dengan PDRB kapita berupa U terbalik, ini membuktikan pada awal pertumbuhan ekonomi disertai ketimpangan. Perkembangan ketimpangan yang dihitung dengan indeks Williamson, total dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Perkembangan Ketimpangan, Dana Perimbangan (Rp Milyar) dan Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Provinsi Kalimantan Selatan, 2010 - 2012**

Tahun	Ketimpangan Antar Daerah	Dana perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi
2010	0,52	930	5,59
2011	0,54	1195	6,97
2012	0,52	1534	5,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Tabel 1 tersebut menunjukkan kondisi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu dari tahun 2010 sampai tahun 2012, dimana pada masa itu merupakan masa yang telah diterapkan sistem desentralisasi di Indonesia, artinya meskipun telah terlaksana desentralisasi tapi ketimpangan masih ada. Ketimpangan antar daerah selama tahun 2010 sampai tahun 2012 berada pada tingkat ketimpangan sedang yakni di antara 0,4-0,69. Dana perimbangan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal ini mendorong potensi dana yang besar dengan kebermanfaatannya bagi daerah.

Daerah di Indonesia masing terjadi ketimpangan antar daerah, hal tersebut terlihat dari ketimpangan yang ada di Kalimantan Selatan, meskipun sudah diterapkan sistem desentralisasi. Desentralisasi dibarengi dengan pemberian dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan daerah otonom untuk pembangunan daerah. Dana perimbangan melingkupi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5,59 persen, tahun 2011 sebesar 6,97 persen dan tahun 2013 sebesar 5,97 persen. Dapat dilihat pada Tabel 1, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Negara atau daerah dikatakan tumbuh apabila pendapatan riilnya naik dari tahun

sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang naik maka berarti di Provinsi Kalimantan Selatan pendapatan riilnya naik. Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua unsur penting dalam proses pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi, pada kenyataannya menunjukkan bahwa antara kedua aspek ini sering kali berlawanan, sedangkan proses pembangunan yang diinginkan memerlukan kedua unsur tersebut dalam waktu yang bersamaan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat tema berkaitan dengan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) apakah desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan? (2) variabel apa yang paling dominan mempengaruhi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan?

Tujuan dalam penelitian ini yakni: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (2) untuk mengetahui variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan pada asas otonomi. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerahnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Sjafrizal, 2017). Desentralisasi fiskal menurut Bird dan Vallaincourt, 1998:5 dalam Kuncoro (2014), adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu negara dengan negara lainnya.

*Buttom up planning* atau perencanaan dari bawah yakni desentralisasi, urusan pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah berdasarkan otonomi. Desentralisasi fiskal, penyerahan pengelolaan keuangan kepada daerah otonom. Tujuan dari penerapan otonomi daerah salah satunya kebijakan desentralisasi fiskal adalah menunjang potensi daerah untuk dimanfaatkan secara lebih baik karena pelibatan masyarakat daerah dalam pembangunan daerah sendiri akan berjalan beriringan dengan kehendak daerah.

Pemerintah daerah ialah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom. Otonomi daerah suatu kewenangan daerah dalam mengatur, mengurus masyarakat setempat. Penerapan otonomi daerah untuk mengembangkan semua potensi ekonomi daerah. Menurut Kuncoro (2014) pelaksanaan otonomi daerah didukung prinsip desentralisasi fiskal sesuai undang-undang nomor 33 pada tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Dana transfer disebut juga dana perimbangan, dana dari pemerintah pusat disalurkan kepada pemerintah daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi. Pembagian wewenang untuk daerah mengelola keuangan untuk pembangunan daerah sesuai kehendak pribadi tapi selaras dengan pembangunan nasional.

### **Dana Perimbangan**

Berdasarkan undang-undang nomor 33 pada tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk dana perimbangan, dana perimbangan merupakan suatu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer daerah pada dasarnya memiliki tujuan yakni sebagai berikut: Kuncoro (2014)

- 1) Untuk mengurangi kesenjangan fiskal di antara pusat dan daerah serta antar daerah;
- 2) Untuk mendukung bagi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah;
- 3) Untuk meningkatkan kualitas pada pelayanan publik;
- 4) Untuk meningkatkan untuk penerimaan daerah;
- 5) Untuk memperluas untuk pembangunan.

Dana perimbangan terdiri atas tiga bagian yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

### **Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan perkembangan perekonomian daerah yang di dalamnya melingkupi bertambahnya produksi barang jasa dari hasil kegiatan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto merupakan akumulasi dari hasil olah barang dan jasa dalam suatu wilayah.

### **Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah**

Ketimpangan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan perbedaan, perbedaan yang membuat keadaan yang tidak seimbang dalam pembangunan di suatu negeri. Perbedaan yang mencolok memperlihatkan kondisi antar satu dengan yang lain timpang, ketidakselarasan membuat suatu wilayah terlihat baik daripada wilayah lainnya. Menurut hipotesis Neo-Klasik (Sjafrizal, 2017) pada awal mula proses pembangunan, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun. Ketimpangan terjadi karena beberapa faktor menurut Sjafrizal (2017) yaitu : (1) perbedaan kandungan sumber daya alam antar daerah, (2) kondisi demografi atau kependudukan, (3) kurang lancarnya mobilitas barang serta jasa, (4) terkonsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan (5) perbedaan alokasi dana pembangunan antar wilayah yang terdapat pada masing-masing daerah.

### **Teori Kuznet**

Menurut Simon Kuznet pada tahap awal pertumbuhan perekonomian, pendapatan terdistribusi cenderung dalam keadaan memburuk lalu pada tahapan berikutnya distribusi pendapatan kemudian mulai membaik atau titik ketimpangan yang mulai menurun pada waktu meningkatnya PDRB per kapita, inilah yang disebut sebagai kurva kuznet atau 'U-terbalik'/'titik balik' (Kuncoro, 2014).

### **Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dari Dodi Chandra, Syurya Hidayat, dan Rosmeli (2017) dalam penelitian, menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi memberikan dampak negatif atau berdampak buruk terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menurut Aulia Ananda Pertiwi (2016), mengatakan kalau dana perimbangan memberikan pengaruh secara signifikan pada ketimpangan

pembangunan antar daerah di Provinsi Jawa Timur. Diki Saputra (2000), dalam penelitian menyebutkan bahwa indeks Williamson berlaku di Provinsi Jawa Barat, dimana hubungan indeks Williamson dengan PDRB kapita berupa U terbalik, ini membuktikan pada awal pertumbuhan ekonomi disertai ketimpangan.

Pembangunan ekonomi suatu daerah sangat erat kaitannya dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki daerah. Potensi ekonomi serta karakteristik suatu daerah pada umumnya berbeda-beda antar daerah satu dengan daerah lainnya. (Glasson, 1977 dalam Rosdyana, Suhendra dan Pasariba (2015). Pertumbuhan ekonomi adalah proses yang tidak menyeluruh serta tidak seimbang. Dalam sebuah proses pertumbuhan ekonomi akan muncul dampak negatif, yaitu ketimpangan pendapatan. Pada awal pertumbuhan ekonomi belum tentu sepenuhnya terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah, ketimpangan pendapatan yang kemudian berkembang menjadi ketimpangan antar wilayah akan berangsur-angsur berkurang pada tahap tertentu (Apriesta, 2013 dalam Kundhani (2015).

Menurut Rosdyana, Suhendra dan Pasariba (2015) pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal mempunyai hubungan secara bersamaan disebabkan dari beberapa penyebab yakni pertumbuhan ekonomi terlihat dari objek desentralisasi fiskal yaitu efisiensi alokasi sumber daya pada sektor publik, serta tujuan dari kebijakan ini adalah menunjang meningkatkan pendapatan perkapita dan pendapatan perkapita merupakan ukuran yang mudah dan dapat menjelaskan keadaan ekonomi. (Zhang & Zou, 2001; dalam Rosdyana, Suhendra dan Pasariba (2015).

## **METODE PENELITIAN**

Lingkup penelitian ini terdiri dari desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Unit analisis penelitian ini daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### ***Ketimpangan Antar Daerah***

Ketimpangan antar daerah adalah hasil dari perhitungan indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2004 sampai tahun 2015 (12 tahun) dalam satuan indeks.

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (f_i/n)}}{y} \quad (1)$$

Dimana:

$V_w$  = indeks Williamson

$y_i$  = PDRB kapita kabupaten/kota,

$y$  = PDRB kapita provinsi,

$f_i$  = jumlah penduduk kabupaten/kota,

$n$  = jumlah penduduk provinsi

#### ***Desentralisasi Fiskal***

Desentralisasi Fiskal merupakan proksi dari total dana perimbangan yang dipublikasikan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2004 sampai tahun 2015 (12 tahun) dalam satuan Rp Milyar.

#### ***Pertumbuhan Ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2004 sampai tahun 2015 (12 tahun) dalam satuan persen (%).

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi pada penelitian ini berupa pencatatan, pengumpulan data, mengolah data, dan mempelajari data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang terbit setiap tahun kemudian dikumpulkan untuk dianalisis dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai analisis data, teknik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu/lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Prawoto, 2017). Dalam pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *software Eviews10*. Dalam model regresi diperlukan syarat agar uji asumsi klasik terpenuhi, yakni uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, multikoleniaritas. Uji normalitas untuk mengetahui data menyebar atau berdistribusi normal, uji autokorelasi untuk mengetahui korelasi pada residual, uji heterokedastisitas untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian residual dan uji multikoleniaritas untuk mengetahui adanya korelasi yang kuat atau tinggi pada antar variabel bebas.

Model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$V_w = \alpha + \beta_1 DF_t + \beta_2 PE_t + e \quad (2)$$

Dimana:

- $V_w$  = ketimpangan antar daerah
- DF = total dana perimbangan (Rp Milyar),
- PE = pertumbuhan ekonomi (%),
- $\alpha$  = konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi
- e = *error term*
- t = tahun (2004 - 2015)

## HASIL DAN ANALISIS

### Data Variabel Penelitian

**Tabel 2**  
**Perkembangan Ketimpangan, Total Dana Perimbangan dan**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, 2004 - 2015**

Tahun	Ketimpangan Antar Daerah	Total Dana Perimbangan (Rp Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2004	0,4	301	5,06
2005	0,45	388	5,06
2006	0,47	594	4,98
2007	0,46	623	6,01
2008	0,44	790	6,45
2009	0,45	1004	5,29
2010	0,52	930	5,59
2011	0,54	1195	6,97
2012	0,52	1534	5,97
2013	0,51	1505	5,33
2014	0,48	1523	4,84
2015	0,45	1576	3,83

Sumber: Hasil Olah Data

Dari Tabel 2 tersebut, perkembangan ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi kesenjangan sedang yakni dari 0,4-0,69. Ketimpangan paling tinggi berada pada tahun 2011 dimana ketimpangan menunjukkan angka 0,54, dan paling rendah pada tahun 2004 dengan angka ketimpangan 0,4. Total dana perimbangan selama 12 tahun selalu meningkat kecuali pada tahun 2010 dan 2013. Meningkatnya dana perimbangan merupakan peluang daerah dalam memanfaatkan dana perimbangan untuk pembangunan daerah di Kalimantan Selatan. Dana perimbangan paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.576 Milyar, dan paling rendah pada tahun 2004 dengan besar dana perimbangan Rp 301 Milyar. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 12 tahun menunjukkan fluktuasi, pertumbuhan ekonomi provinsi merupakan sumbangan dari pertumbuhan ekonomi di dalam provinsi yakni kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antar daerah menunjukkan kemampuan daerah berbeda, karena beda potensi, beda sumber daya alam, beda kekayaan akan menunjukkan perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan paling tinggi pada tahun 2011 dengan nilai pertumbuhan ekonomi 6,96%, paling rendah pada tahun 2015 sebesar 3,33%.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Jumlah Data	Nilai Rata-rata	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Standar Deviasi
DF	12	996.9167	1576.000	301.0000	467.3448
PE	12	5.448333	6.970000	3.830000	0.824377
VW	12	0.474167	0.540000	0.400000	0.041001

Sumber: Hasil Olah Data

Dari Tabel 3 tersebut, DF adalah desentralisasi fiskal yang diproksi dari total dana perimbangan, terdiri dari 12 data, nilai rata-rata Rp 996,9164 Milyar, nilai maksimum Rp 1.567 Milyar, nilai minimum Rp 301 Milyar dan standar deviasi 467,3448. PE adalah pertumbuhan ekonomi terdiri dari 12 data, nilai rata-rata 5,44 persen, nilai maksimum 6,79 persen, nilai minimum 3,83 persen dan standar deviasi 0,82 persen. VW adalah ketimpangan antar daerah, terdiri dari 12 data, nilai rata 0,47, nilai maksimum 0,54, nilai minimum 0,40, dan standar deviasi 0,04.

**Tabel 4**  
**Uji Asumsi Klasik Pada Model Persamaan Penelitian**

Uji Asumsi Klasik	Hasil	Keterangan
Normalitas	0,924138 > 0,05	lulus uji
Multikoleniaritas	1,012316 < 10 atau 5	lulus uji
Autokorelasi	0,1014 > 0,05	lulus uji
Heterokedastisitas	0,4487 > 0,5	lulus uji

Sumber: Hasil Olah Data

Dari Tabel 4, menunjukkan hasil pengujian pada model penelitian, uji asumsi klasik merupakan syarat bagi regresi linier berganda untuk memenuhi syarat regresi. Terdiri dari 4 uji yakni uji normalitas, multikoleniaritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Pada penelitian ini, semua uji asumsi klasik terpenuhi dilihat dari uji normalitas bernilai 0,92 > 0,05 artinya memenuhi data terdistribusi normal, uji multokoleniaritas bernilai 1,012 , 10 atau 5, maka lulus dari multikoleniaritas, uji autokorelasi bernilai 0,1014 > 0,05, artinya tidak ditemukan korelasi antar variabel bebas, dan uji normalitas bernilai 0,92 > 0,05, artinya data terdistribusi dengan normal. Adapun uji hipotesis pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5**  
**Uji Hipotesis Pada Penelitian**

UJI	HASIL	KETERANGAN
R <sup>2</sup>	<i>R-Squared</i> 0,592489	variabel bebas menjelaskan variabel terikat sebesar 59%
F	prob. Statistic, 0,017 < 0,05	DF dan PE bersama-sama mempengaruhi Vw
t	prob. Statistic DF, 0,015 < 0,05	variabel DF berpengaruh signifikan terhadap Vw
t	prob. Statistic PE, 0,049 < 0,05	variabel PE berpengaruh signifikan terhadap Vw

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan Tabel 5, semua uji hipotesis terpenuhi, artinya model dapat lanjut menerjemahkan persamaan model. Nilai *R-Squared* menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas dalam variasi atau naik turunnya ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nilai *R-squared* 0,592489, menunjukkan bahwa sebesar 59% ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. uji F atau uji serempak atau bersama-sama menghasilkan nilai *prob. statistic* 0,017 atau  $0,017 < 0,05$ , maknanya desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan antar daerah. Uji t adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing variabel bebas, hasil uji t menunjukkan nilai prob DF 0,015 atau  $0,015 < 0,05$ , artinya desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar daerah dan nilai *prob statistic* PE 0,049 atau  $0,049 < 0,05$ , artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar daerah. Adapun interpretasi model estimasi regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

### Analisis Data

**Tabel 6**  
**Interpretasi Model Estimasi Regresi Linier Berganda**  
**Variabel Terikat: Ketimpangan Antar Daerah**

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Prob. t-statistic
Desentralisasi Fiskal (DF)	5,58E-05	2,969715
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	0,025388	2,385173
Prob. F-Statistic		0,017541
Adjusted R-Squared		0,502333

Sumber: Hasil Olah Data

Pendekatan model regresi pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, dengan 2 variabel bebas yakni desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan 1 variabel terikat yakni ketimpangan antar daerah. Hasil model persamaan regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut.

$$VW = 0.280259154979 \alpha + 5.57581674335e-05*DF + 0.0253878125305*PE + error\ term$$

$$Ketimpangan\ Antar\ Daerah = 0.280259154979 \alpha + 5.57581674335e-05*Desentralisasi\ Fiskal + 0.0253878125305*Pertumbuhan\ Ekonomi + error\ term$$

Interpretasi model di atas yaitu jika tidak terjadi kenaikan desentralisasi fiskal (total dana perimbangan) dan pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan antar daerah sebesar 0,280277638201, bila terjadi kenaikan Rp 1 milyar total dana perimbangan akan menyebabkan ketimpangan antar daerah naik sebesar 0,0000557, dan kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen akan menaikkan ketimpangan antar daerah sebesar 0,025.

## **Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan**

### ***Desentralisasi Fiskal (Total Dana Perimbangan) Terhadap Ketimpangan Antar Daerah***

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi oleh Pemerintah Daerah Otonom untuk membiayai pembangunan daerahnya di era desentralisasi. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diproksi dari total dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan antar daerah, artinya dana perimbangan belum mampu mengatasi ketimpangan antar daerah. Dana perimbangan yang selalu meningkat belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, terbukti dari meningkatnya dana perimbangan namun masih terjadi ketimpangan antar daerah di Kalimantan Selatan. Belum mampunya dana perimbangan mengatasi ketimpangan walau dana perimbangan meningkat, artinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dana perimbangan namun juga melihat dampak atas dana perimbangan yang diterapkan kepada daerah di Kalimantan Selatan.

Menurut Pertiwi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa pemberian dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Menurut Azizi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode dari tahun 2006 sampai tahun 2014, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi regional, maknanya Dana Bagi Hasil tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki ketimpangan regional. Pembagian dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam yang berdasarkan daerah asal itu cenderung menimbulkan terjadinya ketimpangan antar daerah, hal ini disebabkan karena hanya beberapa daerah saja yang memiliki SDA yang besar seperti minyak bumi, gas alam, kehutanan, pertanian dan pertambangan sedangkan daerah lain tidak memilikinya. Begitupula dengan potensi penerimaan daerah dari PBB, BPHTB dan PPh perorangan (Wijaya, 2002). Hasil dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sesuai dan mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Zasriati (2011), Chandra, Hidayat, dan Rosmeli (2017), Tutik Yuliani (2015), dan Tambunan (2001).

## **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan**

### ***Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antar Daerah***

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan perekonomian daerah. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi daerah tinggi merupakan indikasi perekonomian yang bagus bagi daerah, namun jika hanya pada daerah tertentu pertumbuhan ekonominya tinggi dan daerah yang lain rendah maka ini akan menciptakan ketidakmerataan pembangunan yang menimbulkan terjadinya ketimpangan antar daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Apriesta (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses yang tidak menyeluruh dan tidak seimbang. Menurut Rosdyana (2015) mengemukakan bahwa

desentralisasi memang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun juga diiringi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan di beberapa daerah disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di setiap daerah. Hasil dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini sesuai dan mendukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan oleh Apriesta (2013), Aprilianto (2013), Yuliani (2015), dan Saputra (2016).

### **Analisis Variabel Dominan Mempengaruhi Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan**

Dana perimbangan memberikan pengaruh terhadap ketimpangan antar daerah, namun hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang paling dominan mempengaruhi terhadap ketimpangan antar daerah, Artinya, hipotesis kedua diterima maka total dana perimbangan bukan variabel dominan yang mempengaruhi ketimpangan antar daerah.

## **PENUTUP**

### **Implikasi Penelitian**

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan mengakibatkan meningkatnya ketimpangan antar daerah, dimana peningkatan tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan belum mampu mengatasi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah indikator keberhasilan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi mengakibatkan meningkatnya ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dimana hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu (1) menggunakan periode dari tahun 2004 sampai tahun 2015 dari rencana awal periode dari tahun 2003 sampai tahun 2017, karena tidak tersedianya data dan belum tetapnya data membuat periode penelitian yang digunakan terbatas dan (2) keterbatasan penulis dalam mencari faktor selain desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dikarenakan ketidakcocokan ataupun tidak tersedianya data yang ingin dimasukkan dalam model penelitian ini.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini yakni (1) desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (2) pertumbuhan ekonomi paling dominan mempengaruhi ketimpangan antar daerah.

### **Saran**

Saran-saran yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni (1) Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperhatikan dampak dana perimbangan terhadap daerahnya, agar dana perimbangan tidak hanya dilihat dari besarnya yang selalu meningkat tapi juga dampak dari dana perimbangan tersebut terhadap daerah, agar dana perimbangan bukan menjadi penyebab ketimpangan namun menjadi faktor menurunnya ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (2) Besarnya dana perimbangan yang didapatkan oleh Pemerintah Kalimantan Selatan setiap tahunnya menaikkan angka ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dari itu dibutuhkan upaya Pemerintah Kalimantan Selatan untuk memanfaatkan

dana tersebut dengan membuat pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan dengan memperhatikan ketimpangan antar daerah, sehingga angka ketimpangan dapat menurun setiap tahunnya melalui pemanfaatan dana perimbangan. (3) Angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya menaikkan angka ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dari itu, perlu upaya Pemerintah Kalimantan Selatan meningkatkan pembangunan antar daerah bersamaan dengan mengurangi ketimpangan antar daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang baik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tertinggal agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya dan (4) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan selain dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

### Daftar Pustaka

- Aprilianto, I. (2013). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah Dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2006-2014. *Economic and Business Of Islam*, 113.
- BPS. (2019). *Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018*. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmedi. (2017). Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Paradigma Ekonomi*, 74.
- Indonesia, R (2004). *Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R (2015). *Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kundhani, E. Y. (2015). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesenjangan Antar Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Tesis*, 2.
- Prawoto, A. T. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosdyana, D., Suhendra, E., & Pasariba, R. B. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2009-2013. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, 125.
- Sjafrizal. (2017). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudantoko, D. (2003). *Dilema Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Wardana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora, Volume 15 no.2 Juli 2013: 111-118*, 112.
- Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *Economics and Policy*, 52.

Zasriati, M. (2011). *Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Ekonomi Regional*. Padang: Universitas Andalas.